Silabus Mitigasi, Pemantauan, dan Advokasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia

Koalisi Kebebasan Berserikat

(Silabus)

Mitigasi, Pemantauan, dan Advokasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia

Tim Penyusun

Ajeng Larasati
Alia Yofira Karunian
Astatantica Belly Stanio
Dania Joedo
Raden Violla Reininda Hafidz
Riza Imaduddin Abdali

Ilustrasi & Tata Letak

Adisty Meutia Firdausi

Penerbit

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Sekretariat Koalisi Kebebasan Berserikat (YAPPIKA)
Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA)
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia
Email: office@yappika-actionaid.or.id
Website: https://yappika-actionaid.or.id
April 2026

Daftar Isi

DAFTAR ISI (3)

KONTEKS (4)

TERLIBAT DALAM GERAKAN SOSIAL (5)

STRATEGI PERAWATAN DAN PERLAWANAN KOLEKTIF ORANG MUDA (5)

TUJUAN STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS MITIGASI, PEMANTAUAN, DAN ADVOKASI (10)

KURIKULUM PENINGKATAN KAPASITAS (12)

METODE PENINGKATAN KAPASITAS (14)

ALUR UMUM PENINGKATAN KAPASITAS (15)

ALUR FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS (16)

Ko-Kreasi Tujuan Belajar yang Kontekstual dan Bermakna 16

Pengantar Pelatihan 17

Dinamika Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia 18

Mitigasi Risiko dan Pelindungan Masyarakat Sipil dalam Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia 21

Pemantauan atas Implementasi Hak Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia 24

Advokasi untuk Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia 27

Rencana Aksi Kolektif 31

Penutup Pelatihan 33

Merumuskan Rencana Aksi Kolektif yang Berkelanjutan Bersama Anak Muda 33

PROFIL KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) (36)

Konteks

Gelombang kemunduran demokrasi, lahirnya kembali otoritarianisme, dan proses otokrasi terjadi di banyak negara di dunia dalam satu dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia adalah penyempitan ruang sipil, termasuk meningkatnya kekerasan bagi masyarakat sipil. Terdapat delapan pola kekerasan yang dialami masyarakat sipil selama 2014 - 2024 (YAPPIKA, 2025; Koalisi Kebebasan Berserikat, 2024), antara lain 1) *repressive development* bernama Proyek Strategis Nasional (PSN); 2) kontrol administratif; 3) stigmatisasi, defamasi, dan operasi informasi; 4) kekerasan fisik dan intimidasi; 5) perburuan, kriminalisasi, dan tuntutan hukum; 6) serangan digital dan pembatasan akses internet; 7) kooptasi dan fragmentasi yang disponsori oleh negara; dan 8) politisasi regulasi dan institusi pemerintah.

Dalam situasi penyempitan ruang sipil dan meningkatnya represi dari negara, setidaknya terdapat tiga kondisi yang memperlihatkan masyarakat sipil memiliki kemampuan adaptasi dan resiliensi dalam melawan otokrasi. Pertama, muncul dan meluasnya gerakan organik dari warga di berbagai wilayah yang mayoritas didorong oleh orang muda–dikenal sebagai gerakan rimpang *(rhizomatic movement)*. Perlawanan ini dapat dilihat dari gelombang aksi kolektif, dari mulai aksi #IndonesiaDarurat pada Agustus 2024 yang terjadi di 60 lokasi, aksi #IndonesiaGelap pada Februari 2025 di 47 lokasi, hingga aksi Agustus-September 2025. Kedua, potensi mobilisasi sumber daya publik yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Ketiga, penggunaan *platform digital* yang terus meluas dan membesar dalam gerakan masyarakat sipil dalam melakukan kerja-kerja kampanye dan advokasi.

Peningkatan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perlawanan masyarakat sipil melawan otokrasi yang menjadi dua faktor utama bagi Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam mengembangkan, merancang, dan menguji coba strategi perawatan dan perlawan kolektif orang muda. Siklus atau tahapan awal yang dirancang oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) adalah analisis konteks dan pengembangan desain/alat pembelajaran kolektif dalam bentuk Modul dan Silabus Pelatihan Mitigasi, Pemantauan, dan Advokasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia. Dalam hal ini, KKB mengembangkan modul dan silabus pada dua dokumen yang terpisah, di mana silabus menjadi panduan bagi Tim Fasilitator untuk menjembatani proses peningkatan kapasitas.

Alat pembelajaran ini diperuntukkan dan telah diuji coba di 3 wilayah (Jabodetabek, Pekanbaru, dan Bandung) kepada 4 kelompok, antara lain:

- Orang muda dengan usia 15 - 30 tahun di perkotaan;
- Komunitas/organisasi orang muda atau komunitas/organisasi yang dipimpin oleh orang muda;
- Pengabdi bantuan hukum (PBH) dan asisten pengabdi bantuan hukum (APBH) muda; dan
- Paralegal muda dan paralegal komunitas.

Di dalam proses uji coba dan refleksi terhadap alat pembelajaran, setidaknya terdapat dua batasan sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Pertama, alat pembelajaran ini belum mengakomodasi kebutuhan dan metode untuk kelompok disabilitas. Kedua, alat pembelajaran ini belum diuji coba dan direfleksikan bersama komunitas/organisasi orang muda dengan konteks rural dan tapak. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi alat pembelajaran oleh Tim Fasilitator sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari peserta agar lebih relevan, inklusif, dan berdampak.

Terlibat dalam Gerakan Sosial

Merujuk pada ***Social Movement Engagement Guidance*** yang disusun oleh *ActionAid International,* terdapat 10 aspek dalam memperkuat keterlibatan dalam gerakan sosial, antara lain:

1. Pemetaan
2. Solidaritas
3. Peningkatan kapasitas
4. Riset
5. Kolaborasi
6. Terhubung
7. Dukungan pendanaan
8. Penggalangan dana
9. Analisis risiko
10. Kapasitas sumber daya manusia

Panduan tersebut disusun untuk mendukung organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam membangun keterlibatan yang bermakna dengan gerakan sosial. Secara khusus, panduan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gerakan sosial serta memandu praktik kerja yang baik untuk menghindari *Sexual Harassment, Exploitation and Abuse* (SHEA) dan meminimalisasi risiko bagi gerakan, aktivis, maupun OMS yang terlibat.

Mengacu pada panduan tersebut, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) kemudian mengadaptasinya sebagai desain strategi dalam memfasilitasi perawatan dan perlawanan kolektif orang muda.

Strategi Perawatan dan Perlawanan Kolektif Orang Muda

Selain mengacu pada *Social Movement Engagement Guidance,* strategi yang dikembangkan oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) juga didasarkan pada prinsip utama pendekatan hak asasi manusia, yaitu: **1) Pemberdayaan; 2) Solidaritas; 3) Kampanye; dan 4) Alternatif berbasis hak.** Dalam kerja-kerja KKB, strategi ini merupakan

pengembangan dari 4 fokus kerja, yaitu: **1) Peningkatan kapasitas; 2) Pengelolaan pengetahuan; 3) Advokasi kebijakan berbasis bukti; dan 4) Penguatan jaringan masyarakat sipil lintas isu, generasi, dan wilayah.**

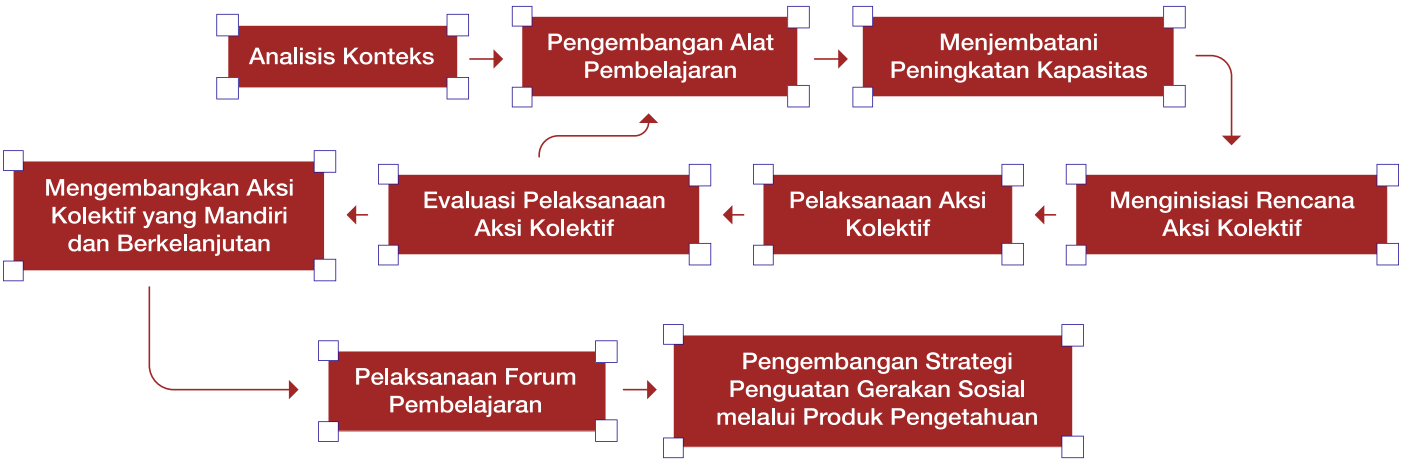

Analisis Konteks

Dalam tahap analisis konteks, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pemetaan, riset, dan analisis risiko. Pemetaan dilakukan untuk memahami lanskap gerakan sosial dalam konteks tertentu serta mengidentifikasi aktor yang terlibat, termasuk kebutuhan, kepentingan, dan posisi mereka. Proses pemetaan berhubungan erat dengan riset, karena pengembangan pendekatan strategis dapat berangkat dari refleksi, dokumentasi, dan pembelajaran dari pengalaman gerakan sosial sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemetaan dan riset tersebut, analisis risiko kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang mungkin muncul ketika terlibat dengan gerakan sosial. Melalui analisis risiko, organisasi masyarakat sipil dapat menyusun langkah mitigasi yang tepat dan kontekstual sebagai upaya membangun keamanan dan perawatan kolektif dalam gerakan yang dipimpin oleh orang muda.

Pengembangan Alat Pembelajaran

Kemudian, dalam tahap pengembangan alat pembelajaran, terdapat lima aspek utama, yakni riset, peningkatan kapasitas, kapasitas sumber daya manusia (SDM), keterhubungan, dan kolaborasi. Riset dalam tahap ini berfokus pada pemahaman dinamika gerakan yang lebih luas serta keterkaitannya dengan konteks partisipan dan kebutuhan pembelajarannya. Temuan riset tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan materi dan metode yang digunakan dalam menjembatani peningkatan kapasitas. Oleh karenanya, proses peningkatan kapasitas tidak hanya meliputi mentransfer pengetahuan, melainkan juga upaya merumuskan alat pembelajaran yang dapat mendorong aksi kolektif yang dipimpin oleh orang muda.

Dalam tahap pengembangan alat pembelajaran, penting untuk memperhatikan kapasitas SDM, terutama kesiapan fasilitator maupun tim pendukung dalam mengelola proses pembelajaran. Hal

ini mencakup kemampuan metodologis, sensitivitas terhadap keberagaman, serta pemahaman terhadap prinsip keamanan holistik dalam gerakan. Selain itu, keterhubungan dan kolaborasi menjadi dua aspek penting lainnya dalam tahapan ini. Membangun relasi lintas isu dan melibatkan beragam aktor secara aktif akan memperluas perspektif dan memastikan bahwa alat pembelajaran yang dikembangkan tidak bersifat satu arah.

Menjembatani Peningkatan Kapasitas

Tahap ini berfokus pada upaya menjembatani kebutuhan pembelajaran dengan praktik penguatan gerakan sosial oleh orang muda. Memfasilitasi penguatan kapasitas dapat mencakup berbagai macam topik yang dapat mendukung konsolidasi gerakan dan munculnya pemimpin baru di kalangan orang muda. Dalam konteks ini, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) memilih topik mitigasi, pemantauan, dan advokasi dalam kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi untuk memperkuat kapasitas orang muda dalam merespon berbagai tantangan gerakan sosial saat ini. Sebagai ruang pembelajaran yang menekankan pada refleksi dan aksi, kapasitas SDM dari tim fasilitator menjadi penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan partisipatif dan inklusif. Selain itu, keterhubungan dan kolaborasi dapat berperan memperluas dampak dari proses pembelajaran, misalnya memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas komunitas dan/atau organisasi, terbentuknya solidaritas, serta memperluas jaringan antar aktivis muda untuk memperkuat aksi kolektif.

Menginisiasi Rencana Aksi Kolektif

Pada tahap menginisiasi rencana aksi kolektif, aspek-aspek yang penting adalah keterhubungan dan kolaborasi, dukungan pendanaan, serta analisis risiko. Keterhubungan dan kolaborasi memastikan bahwa rencana aksi kolektif dirumuskan bersama-sama secara partisipatif serta terdapat pembagian peran dan sumber daya untuk mencapai tujuan kolektif.

Selain itu, untuk mendorong agar aksi kolektif dapat terealisasikan, dukungan pendanaan menjadi salah satu elemen penting. Dalam memberikan dukungan pendanaan, organisasi masyarakat sipil perlu mempertimbangkan jenis dukungan yang paling bermanfaat bagi gerakan yang dipimpin oleh orang muda. Alih-alih dengan hibah besar dengan persyaratan administrasi yang kompleks dan berpotensi membebani, skema pendanaan yang lebih kecil, fleksibel, dan berbasis kebutuhan seringkali lebih efektif. Fleksibilitas dan kepercayaan menjadi prinsip utama dalam dukungan pendanaan, yang memberikan akses bagi orang muda untuk memiliki akses cepat terhadap sumber daya sembari tetap melakukan mitigasi risiko yang tepat. Oleh karenanya, dukungan pendanaan juga tetap dirancang sejalan dengan analisis risiko untuk meminimalisir kerentanan gerakan orang muda.

Pelaksanaan Aksi Kolektif

Tahap pelaksanaan aksi kolektif, aspek solidaritas menjadi pondasi utama yang menjaga kohesi gerakan, teru-

tama dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul di ruang publik. Organisasi masyarakat sipil dapat menunjukkan solidaritas tidak hanya lewat pernyataan dukungan, tapi juga komitmen konkret untuk saling menjaga dan memperkuat gerakan. Oleh karenanya, dalam tahap ini keterhubungan dan kolaborasi tetap menjadi dua aspek penting untuk memastikan aksi kolektif terkoordinasi dan tidak berjalan secara terisolasi. Kolaborasi juga perlu dibangun secara setara, untuk mendorong adanya mekanisme pembagian peran dan tanggung jawab, serta sumber daya secara adil dan transparan. Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan bersama serta meminimalisir adanya ketimpangan relasi dalam kemitraan dengan gerakan orang muda.

Sementara itu, dukungan pendanaan memungkinkan kebutuhan operasional, logistik, maupun keamanan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan aksi kolektif. Organisasi masyarakat sipil perlu memastikan bahwa sistem dan kerangka kemitraan yang dibangun tidak memberatkan gerakan orang muda, sambil tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Evaluasi Pelaksanaan Aksi Kolektif

Setelah pelaksanaan aksi kolektif, siklus berlanjut pada tahap evaluasi untuk merefleksikan proses, capaian, serta tantangan yang muncul selama implementasi. Dalam mendukung gerakan orang muda, tahap evaluasi menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi pembelajaran bersama sekaligus merumuskan strategi yang lebih berkelanjutan. Oleh karenanya, aspek riset menjadi signifikan untuk mendokumentasikan setiap proses yang berjalan baik dari refleksi orang muda secara langsung, maupun analisis pola, tantangan, dan peluang struktural yang muncul. Hasil riset ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pengetahuan, strategi advokasi, maupun pendekatan pengorganisiran ke depannya.

Selain itu, dalam proses ini aspek solidaritas, keterhubungan, serta kolaborasi juga berperan sebagai landasan yang memungkinkan refleksi kolektif dilakukan secara terbuka, beragam, dan partisipatif. Dengan memastikan adanya tiga aspek tersebut, tahap evaluasi dapat menjadi ruang aman bagi orang muda untuk berbagi pengalamannya dengan setara dan mendorong adanya bentuk perawatan kolektif dalam gerakan.

Mengembangkan Aksi Kolektif yang Mandiri dan Berkelanjutan

Tahap ini berfokus pada memperkuat kapasitas gerakan orang muda agar mampu terus beradaptasi dan resilien tanpa ketergantungan yang tinggi pada pihak eksternal. Dalam tahap ini, solidaritas menjadi aspek penting untuk menjaga komitmen antar orang muda serta memperkuat rasa kepemilikan bersama atas agenda gerakan yang telah dibangun. Selain itu, aspek keterhubungan dan kolaborasi juga perlu diprioritaskan untuk memperluas dukungan lintas isu dan wilayah serta memperkuat jaringan yang sudah ada.

Dalam tahap mengembangkan aksi kolektif yang mandiri dan berkelanjutan, satu aspek yang paling penting adalah penggalangan dana. Dalam mendukung gerakan orang muda supaya tidak terbatas reaksioner, perlu ada sumber daya yang cukup untuk menjalankan inisiatif jangka menengah hingga panjang. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, tentunya disesuaikan dengan konteks gerakan orang muda itu sendiri, misalnya melalui dukungan langsung terhadap komunitas, inisiatif solidaritas, maupun bentuk penggalangan dana lainnya yang partisipatif dan transparan.

Pelaksanaan Forum Pembelajaran

Tahap pelaksanaan forum pembelajaran dirancang sebagai wadah refleksi kolektif bagi orang muda untuk berbagai pengalaman, pengetahuan, serta praktik baik yang muncul selama mereka mengimplementasikan berbagai aksi kolektif. Oleh karena itu, aspek solidaritas, keterhubungan, dan kolaborasi menjadi landasan utama dalam menciptakan ruang aman untuk mereka saling berbagi dan membentuk jaringan yang lebih luas. Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek riset yang berperan dalam mendokumentasikan setiap refleksi yang muncul dari aksi orang muda untuk mengidentifikasi secara kolektif apa pola, tantangan, dan peluang yang dapat menjadi pembelajaran bersama.

Dalam aspek lain, peningkatan kapasitas dan kapasitas SDM juga penting karena forum pembelajaran merupakan sarana pertukaran pengetahuan dan penguatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan gerakan. Oleh karena itu, adanya tim fasilitator yang mumpuni dapat membantu memastikan proses forum pembelajaran berjalan dengan lebih efektif.

Pengembangan Strategi Penguatan Gerakan Sosial

Tahap terakhir dalam siklus ini adalah pengembangan strategi penguatan gerakan sosial. Dalam tahap ini, proses perumusan strategi mempertimbangkan berbagai pembelajaran yang telah didokumentasikan bersama dengan orang muda. Pemetaan menjadi langkah awal untuk memahami lanskap gerakan, dan didukung dengan riset yang menganalisis praktik-praktik sebelumnya. Berdasarkan dua proses tersebut, analisis risiko akan muncul untuk mengidentifikasi potensi tantangan maupun kerentanan yang dapat terjadi dalam keberlanjutan gerakan. Selain itu, aspek solidaritas berperan sebagai landasan dalam memastikan bahwa strategi yang dikembangkan tetap berakar pada kepentingan kolektif, khususnya oleh orang muda.

Tujuan Strategis Peningkatan Kapasitas Mitigasi, Pemantauan, dan Advokasi

Berdasarkan Strategi Perawatan dan Perlawanan Kolektif Orang Muda, KKB menerjemahkannya ke dalam tiga pilar taktis sebagai langkah awal membangun ekosistem yang aman bagi gerakan orang muda. Pilar-pilar ini membekali orang muda dengan pengetahuan dan kapasitas dalam:

1) Mitigasi: Sebagai upaya preventif untuk meminimalisir kerentanan dan risiko, serta memastikan adanya ruang aman.
2) Pemantauan: Sebagai instrumen check and balances dalam mengawasi dan mendokumentasikan kondisi kebebasan sipil secara objektif, sekaligus bahan advokasi berbasis bukti untuk mendukung narasi perlawanan.
3) Advokasi: Sebagai bentuk partisipasi aktif dan bermakna dari orang muda dalam memengaruhi kebijakan dan merebut kembali hak kebebasan sipil.

Implementasi dari pilar-pilar tersebut kemudian diwujudkan melalui tujuan spesifik dalam silabus ini, yaitu:

1) Mengembangkan modul mitigasi, pemantauan, dan advokasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi di Indonesia yang sedang disusun oleh KKB;
2) Mengembangkan pemahaman komunitas/organisasi orang muda mengenai tren dan tantangan implementasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi di Indonesia;
3) Memperkuat kapasitas komunitas/organisasi orang muda dalam menyusun strategi mitigasi risiko dan pelindungan dalam implementasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi;
4) Memperkuat kapasitas komunitas/organisasi orang muda dalam menggunakan instrumen pemantauan implementasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi; dan
5) Memperkuat kapasitas komunitas/organisasi orang muda dalam pembuatan kertas posisi berbasis bukti dan video pendek yang kreatif sebagai bagian dari advokasi untuk kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.
6) Mengembangkan rencana aksi kolektif yang diinisiasi oleh komunitas/organisasi orang muda untuk melakukan strategi mitigasi, pemantauan, dan advokasi kasus kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.

INPUT

Pengalaman langsung dari peserta sebagai titik awal pembelajaran. Setiap peserta membawa narasi, tantangan dan praktik yang mereka alami dalam konteks kerja atau komunitas masing-masing.

PROSES

1) Konsep, Tren dan Tantangan;
2) Mitigasi Risiko dan Perlindungan Masyarakat Sipil;
3) Pemantauan;
4) Advokasi untuk Implementasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Bergorganisasi; dan
5) Rencana Aksi Kolektif untuk Mempromosikan Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Berorganisasi.

OUTPUT

1) Peserta dapat memahami tentang konsep, tren dan tantangan implementasi kebebasan berkekspresi, berkumpul dan berorganisasi di Indonesia.
2) Peserta mampu menyususn strategi mitigasi risiko dan perlindungan masyarakat sipil dalam implementasi, berkumpul dan berorganisasi.
3) Peserta mampu mempraktikkan pemantauan implementasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi.
4) Peserta mampu mempraktikkan advokasi kebebasan, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.
5) Peserta mampu merumuskan rencana aksi kolektif yang berkelanjutan untuk mempromosikan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.

Kurikulum Peningkatan Kapasitas

TOPIK	POKOK BAHASAN	METODE	WAKTU
Ko-Kreasi Tujuan Pembela-jaran yang Konteks-tual dan Bermakna (dilak-sanakan sebelum pelatihan)	1) Identifikasi konteks, kebutuhan, dan harapan peserta secara individu maupun kolektif; dan 2) Pemetaan prioritas topik pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta	Mengisi *form online*	15 menit
Pengantar Pelatihan	1) Pembukaan dan Perkenalan 2) Tata Tertib Umum Pelatihan *3) Pre-test*	1) Presentasi 2) Curah pendapat 3) Mengisi *form online*	30 menit
Dinamika Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Beror-ganisasi di Indonesia	1) Kebebasan berekspresi dan berpendapat; 2) Kebebasan berkumpul dan Kebebasan berorganisasi; 3) Potensi risiko pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia; 4) Tren dan tantangan di Indonesia akan diuraikan, terutama mengenai bagaimana kebebasan-kebebasan ini sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dan batasan; dan 5) Memahami komunitas dan	1) Presentasi 2) Diskusi dan tanya jawab *3) Brainstor-ming* atau curah pendapat	120 menit

TOPIK	POKOK BAHASAN	METODE	WAKTU
	marjinalisasi yang dihadapi oleh korban dalam pembatasan kebebasan sipil.		
Strategi Mitigasi Risiko dan Pelindungan Masyarakat Sipil dalam Imple-mentasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Beror-ganisasi	1) Pengantar mitigasi risiko dan pelindungan masyarakat sipil; 2) Paparan risiko yang potensial dihadapi dalam melakukan kebebasan sipil; dan 3) Penyusunan strategi mitigasi risiko dan pelindungan masyarakat sipil.	1) Diskusi kelompok menggu-nakan studi kasus 2) Kerja Mandiri 3) Brain-storming atau curah pendapat	
Peman-tauan Imple-mentasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Beror-ganisasi	1) Urgensi pemantauan serta kerangka konseptual hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi; 2) Prinsip-prinsip pemantauan; 3) Metodologi pemantauan; dan 4) Teknik pemantauan serta analisis terhadap pembatasan dan/ atau pelanggaran hak-hak tersebut.	1) Diskusi kelompok dan tanya jawab 2) Presentasi 3) Praktik	185 menit
Advokasi Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Beror-ganisasi	1) Pengertian dan prinsip-prinsip dasar advokasi; 2) Strategi dan teknik advokasi; 3) Analisis pemetaan aktor atau pemangku	1) Presentasi 2) Kerja Kelompok 3) Curah pendapat 4) Diskusi dan tanya jawab 5) Praktik	385 menit

TOPIK	POKOK BAHASAN	METODE	WAKTU
	kepentingan; 4) Menyusun kertas posisi; 5) Menyusun rencana kampanye; dan 6) Memproduksi video pendek untuk kampanye kreatif.		
Rencana Aksi Kolektif	Penyusunan rencana aksi kolektif setelah pelatihan.	1) Curah pendapat 2) Kerja mandiri	30 menit 15 menit
Refleksi	*1) Post test* 2) Evaluasi kegiatan	Mengisi form *online*	75 menit
Rencana Aksi Kolektif yang Berke-lanjutan (dilaksanakan setelah pela-tihan)	1) Identifikasi aktor, ketimpangan kuasa, dan hambatan yang dihadapi peserta dan komunitasnya dalam mengakses ruang sipil dan kebebasan sipil. 2) Gambaran visi kolektif dari perspektif orang muda tentang masyarakat yang adil dan setara dalam konteks kebebasan sipil. 3) Penyusunan rencana aksi kolektif yang berkelanjutan yang dipimpin oleh orang muda.	1) Curah pendapat 2) Diskusi dan tanya jawab	

Metode Peningkatan Kapasitas

- Menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa dengan menempatkan pengalaman peserta sebagai sumber utama pembelajaran.
- Mengutamakan pendekatan partisipatif dan interaktif dengan melibatkan peserta dalam daur belajar setiap sesi.

Alur Umum Peningkatan Kapasitas

Alur Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Materi	**Ko-Kreasi Tujuan Belajar yang Kontekstual dan Bermakna**
Pokok bahasan	1) Pembukaan dan Perkenalan 2) Tata Tertib Umum Pelatihan *3) Pre-test* Pelatihan
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta memahami pengantar pelatihan, tujuan, dan peraturan dasar selama pelatihan; 2) Peserta berkenalan dengan menulis dan membacakan kata-kata afirmasi singkat ke satu sama lain; 3) Peserta dapat menyelesaikan Pre-test dengan memahami tujuannya sebagai bagian dari proses evaluasi pelatihan.
Metode	Mengisi form online
Alat dan Bahan	*Pre-test (barcode google form)*
Waktu	15 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Tim Fasilitator menyusun pertanyaan pre-assessment bagi calon peserta, antara lain:
   a) Ceritakan sedikit tentang peranmu di komunitas/organisasi/ruang kerja sosialmu saat ini.
   b) Apakah kamu pernah mengalami, menyaksikan, atau mendampingi kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, atau berorganisasi?
      - Tidak
      - Ya

      Kalau ya, ceritakan singkat pengalamannya: …
   c) Dari keseluruhan materi pelatihan ini (mitigasi, pemantauan, dan advokasi), topik apa yang paling ingin kamu pelajari lebih dalam? Kenapa?
   d) Metode belajar seperti apa yang menurutmu paling membantumu menyerap materi? (boleh pilih lebih dari satu)
      - Diskusi kelompok
      - Studi kasus
      - Simulasi/praktek langsung (roleplay, permainan, atau sebagainya)
      - Cerita pengalaman peserta
      - Materi presentasi
      - Refleksi individu
      - Lainnya: _____
   e) Apakah ada hal khusus yang perlu difasilitasi agar kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam belajar bersama (misalnya kebutuhan aksesibilitas, bahasa, dinamika kelompok, dll)?
   f) Menurutmu, kekuatan utama apa yang kamu bawa ke dalam ruang belajar bersama ini?

Materi	Pengantar Pelatihan
Pokok bahasan	1) Pembukaan dan Perkenalan 2) Tata Tertib Umum Pelatihan *3) Pre-test* Pelatihan
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta memahami pengantar pelatihan, tujuan, dan peraturan dasar selama pelatihan; 2) Peserta berkenalan dengan menulis dan membacakan kata-kata afirmasi singkat ke satu sama lain; 3) Peserta dapat menyelesaikan Pre-test dengan memahami tujuannya sebagai bagian dari proses evaluasi pelatihan.
Metode	1) Presentasi 2) Curah pendapat
Alat dan Bahan	*1) Pre-test (barcode google form)* 2) Lembar kerja perkenalan dengan 4 pertanyaan kunci.
Waktu	30 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator membuka sesi pelatihan.
2) Fasilitator memperkenalkan diri dan seluruh Tim Fasilitator (5 menit)
3) Fasilitator menyerahkan ke forum soal *House Rules (do's & dont's* selama pelatihan) (5 menit).
4) Fasilitator mempersilahkan kepada setiap peserta untuk memperkenalkan diri dengan dengan menjawab empat pertanyaan ini lewat gambar/ilustrasi sederhana, kemudian berkelompok 5 orang, 10 orang, dan seterusnya (disesuaikan dengan jumlah peserta) untuk menceritakan hasil gambar masing-masing (10 menit):
   - Apa kapasitas dasar Anda di masa lalu?
   - Apa kapasitas keren Anda hari ini?
   - Apa kapasitas yang Anda buang/tidak berguna?
   - Bagaimana kapasitas Anda berkembang?
5) Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang proses pengisian *Pre-test,* meliputi tujuan dan isinya. Peserta diminta mengisi *form Pre-test* melalui *barcode google form* yang disiapkan oleh Tim Fasilitator. (10 menit)
6) Setelah semua peserta mengisi *form Pre-Test*, Fasilitator menutup sesi.

Materi	**Dinamika Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia**
Pokok bahasan	1) Kebebasan berekspresi dan berpendapat. 2) Kebebasan berkumpul dan Kebebasan berorganisasi. 3) Potensi risiko pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia. 4) Tren dan tantangan di Indonesia akan diuraikan, terutama mengenai bagaimana kebebasan-kebebasan ini seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan dan batasan. 5) Memahami komunitas dan marjinalisasi yang dihadapi oleh korban dalam pembatasan kebebasan sipil.
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta dapat memperkuat pemahamannya mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat; 2) Peserta dapat memperkuat pemahamannya mengenai kebebasan berkumpul dan berorganisasi; 3) Peserta dapat mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia; 4) Peserta dapat mengidentifikasi tren dan tantangan dari kebebasan-kebebasan tersebut; 5) Peserta dapat memahami analisis interseksionalitas dalam kasus pelanggaran kebebasan sipil.
Metode	1) Presentasi singkat 2) Diskusi dan tanya jawab 3) Brainstorming atau curah pendapat 4) Diskusi kelompok
Bahaan Bacaan	1) Modul 1 Dinamika Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berorganisasi di Indonesia 2) Jenis Resiko Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 3) Jenis Resiko Kebebasan Berkumpul 4) Jenis Resiko Kebebasan Berorganisasi
Alat dan Bahan	1) Presentasi 2) Studi kasus untuk diskusi kelompok 3) Plano 4) Metaplan 5) Spidol
Waktu	120 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator menginformasikan profil modul, tujuan pembelajaran, dan bahan bacaan yang digunakan (5 menit).
2) Fasilitator mengajak peserta untuk berefleksi melalui curah pendapat tentang: pengetahuan dan/atau pengalaman peserta terkait kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi (25 menit).
   - Fasilitator menampilkan pertanyaan seputar kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi melalui tayangan slide presentasi. Jawaban dari pertanyaan akan dibagi berdasarkan kategori *Yes* dan *No.*
     * Apakah postingan/akun media sosialmu pernah kena *takedown*/*suspend* ketika sedang mengadvokasikan isu tertentu?
     * Apakah kamu pernah mengalami kekerasan berbasis-gender/pelecehan seksual saat menyuarakan pendapat?
     * Apakah kamu pernah mendapatkan ancaman saat mengadakan diskusi/kegiatan?
     * Apakah acara/kegiatan diskusi yang kamu selenggarakan pernah dibubarkan secara paksa?
     * Apakah universitas pernah melakukan pelarangan untuk turun aksi/demonstrasi?
     * Apakah organisasimu pernah dibekukan/dibubarkan?
     * Apakah kamu pernah mengalami kekerasan saat demonstrasi?
     * Apakah kamu pernah ditangkap polisi saat demonstrasi?
   - Fasilitator meminta peserta yang menjawab Yes dan No untuk berkelompok di dua sisi yang berbeda.
   - Fasilitator meminta peserta untuk membagikan pengalamannya terkait masing-masing pertanyaan.
3) Fasilitator dapat mensintesiskan hasil curah pendapat bersama peserta, co-fasilitator menuliskan hasil sintesis ke metaplan (5 menit).
4) Diskusi pleno tentang kasus pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi dengan syarat 3 tahap pembatasan HAM (10 menit).
5) Fasilitator ceramah tentang pendekatan HAM dalam pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi di Indonesia (5 menit).
6) Diskusi dan tanya jawab (5 menit).
7) Fasilitator menjelaskan tentang interseksionalitas dan marjinalisasi dalam kasus pelanggaran kebebasan sipil (10 menit).
8) Diskusi kelompok untuk mengidentifikasi bentuk marjinalisasi dalam pelanggaran kebebasan sipil berdasarkan studi kasus dengan menjawab pertanyaan (30 menit):
   - Siapa saja kelompok identitas yang termarjinalisasi?
   - Seperti apa bentuk marjinalisasinya?
   - Apa dampaknya bagi yang bersangkutan?
   - Siapa yang melakukannya?
9) Presentasi dari masing-masing kelompok (20 menit).
10) Refleksi dan penutup (5 menit).

Box Studi Kasus

Contoh Studi Kasus I

Dian, seorang mahasiswa semester lima di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan sering terlibat dalam kegiatan advokasi isu-isu sosial, termasuk hak pendidikan dan transparansi anggaran kampus.

Pada bulan September, terjadi kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara sepihak tanpa dialog bersama mahasiswa. Sebagai tanggapan, Dian bersama aliansi mahasiswa berencana melakukan aksi demonstrasi di depan gedung rektorat.

Sehari setelah aksi, Rektor Universitas menerbitkan Surat Edaran No. 142/UNIV/IX/2024 yang berisi larangan terhadap kegiatan demonstrasi di dalam lingkungan kampus dengan alasan menjaga ketertiban akademik. Surat itu juga menyebutkan bahwa mahasiswa yang melanggar akan dikenai sanksi akademik sesuai kode etik berupa *drop out,* skors, dan pencabutan beasiswa.

Contoh Studi Kasus II

Pers Mahasiswa “Lensa Kampus” adalah unit kegiatan mahasiswa di Universitas Nusantara yang fokus pada isu-isu sosial, HAM, dan kebijakan kampus. Pada Februari 2025, tim redaksi mendapatkan informasi dari narasumber anonim mengenai dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswa bimbingannya.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber (termasuk korban), mengumpulkan bukti, dan melakukan verifikasi selama sebulan, Lensa Kampus menerbitkan artikel investigatif berjudul: “Diam di Balik Gelar: Dugaan Kekerasan Seksual oleh Oknum Dosen Senior.”

Artikel tersebut tidak menyebutkan nama dosen secara langsung, namun menyebut posisi dan fakultas yang membuat identitasnya mudah dikenali oleh civitas akademika.

Artikel menjadi viral di media sosial, menimbulkan gelombang solidaritas dari mahasiswa. Rektorat menanggapi dengan menyatakan laporan itu mencemarkan nama baik dan tidak melalui saluran resmi penanganan kasus kekerasan seksual. Pihak kampus meminta Lensa Kampus menarik artikel dan membekukan sementara aktivitas publikasi mereka.

Box Studi Kasus

Contoh Studi Kasus III

Organisasi mahasiswa “Aliansi Mahasiswa Sadar Demokrasi (AMSD)” dikenal aktif mengedukasi dan menyuarakan isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan negara. Dalam suasana panas jelang Pemilu 2025, AMSD mengkritisi kebijakan darurat pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan sipil dan memperluas kewenangan aparat keamanan.

Sebagai bentuk kampanye kesadaran, AMSD membuat infografik, video pendek, dan utas reflektif tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi darurat. Semua unggahan diberi tagar #KeadaanDarurat, yang kemudian viral dan digunakan oleh banyak aktivis dan publik figur.

Namun, dua hari setelah kampanye berjalan, akun Instagram dan Twitter (X) resmi milik AMSD ditangguhkan oleh pihak platform. Dalam pemberitahuan email, disebutkan bahwa akun melanggar Pedoman Komunitas tentang konten sensitif, penyebaran disinformasi, dan konten yang berpotensi memicu keresahan publik.

MATERI	MITIGASI RISIKO DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KEBEBASAN BER-EKSPRESI, BERKUMPUL DAN BERORGANIASSI
Pokok bahasan	1) Pengantar mitigasi risiko dan pelindungan masyarakat sipil 2) Paparan risiko yang potensial dihadapi dalam melakukan kebebasan sipil 3) Penyusunan strategi mitigasi risiko dan pelindungan masyarakat sipil
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta mengetahui potensi risiko serta mitigasi risiko dan pelindungan masyarakat sipil; 2) Peserta dapat menyusun strategi mitigasi dan strategi pelindungan untuk melengkapi aktivitas pengejawantahan kebebasan sipil.
Metode	1) Ceramah singkat 2) Tanya jawab dengan peserta 3) Diskusi kelompok 4) Pengerjaan kuis mandiri

MATERI	MITIGASI RISIKO DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM KEBEBASAN BER-EKSPRESI, BERKUMPUL DAN BERORGANIASSI
	5) Studi kasus 6) Presentasi dengan *metode world cafe*
Bahaan Bacaan	1) M. Ananto Setiawan, Arif Maulana, Miftah Fadhli, dan Riza Imaduddin Abdali. 2019. *Buku Panduan Mitigasi Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.* Jakarta: Sekretariat Koalisi Kebebasan Berserikat. 2) United Nations. 2015. *Human Rights Due Diligence Policy on United Nations Support to Non-United Nations Security Forces.* United Nations. 3) The UN Global Compact. 2021. *What does effective human rights risk management look like? 5 insights from practice.* Global Compact Network Germany, https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDFs/DGCN_Insights_Series_HRDD_Risk_management.pdf 4) TISCO Financial Group Public Company Limited. 2024. *Human Rights Due Diligence Summary Report 2024,* diakses melalui https://www.tisco.co.th/wp-content/uploads/Human-Rights-Due-Diligence-2024.pdf, pada [21/03/2025]. 5) Diah Kusumaningrum, dkk. 2024. *Adu Jitu Melawan Otokrat – Laporan Studi Baseline untuk Connect, Defend, Act!.* Jakarta: Humanis.
Alat dan Bahan Belajar	1) Plano 2) Metaplan 3) Spidol berwarna 4) Sticky notes 5) Sticker jempol 6) Papan tulis 7) Selotip kertas
Waktu	175 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator menjelaskan konteks pelatihan dan memberikan pengantar mitigasi risiko atas persoalan yang sederhana dan terkait dengan kehidupan sehari-hari agar peserta lebih memiliki gambaran soal materi yang akan dihadapi. (5 menit)
2) Fasilitator memberikan kuliah singkat tentang mitigasi risiko dan pelindungan

Langkah-langkah Fasilitasi

masyarakat sipil tentang definisi, manfaat, dan prinsip-prinsip mitigasi risiko. (10 menit)

3) Fasilitator mengarahkan peserta untuk mengidentifikasikan risiko yang potensial dihadapi pada praktik kebebasan berpendapat dan berekspresi, praktik kebebasan berkumpul, dan praktik kebebasan berorganisasi. (30 menit)
   - Peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yang terdiri atas 5 (lima) orang.
   - Peserta membuat memisahkan plano menjadi tiga bagian kebebasan, kemudian peserta menulis risiko pada *sticky notes.* Satu *sticky notes* satu risiko.
   - *Sticky notes* yang telah ditulis ditempel di kertas plano sesuai dengan kolom kebebasan.
   - Fasilitator memberikan feedback tentang risiko dan memberikan penjelasan tentang tipe risiko.
   - Co-Fasilitator membantu memberikan feedback tertulis kepada peserta.
4) Fasilitator memberikan kuliah singkat tentang mengukur derajat keparahan (*severity degree*) risiko. (10 menit)
5) Fasilitator mengarahkan peserta untuk mengukur derajat keparahan risiko yang telah diidentifikasikan sebelumnya. (30 menit)
   - Peserta mengelompokkan risiko di tiap-tiap kebebasan dan mengukur derajat keparahan risiko menggunakan stiker label berwarna merah dan hijau. (**Ekstrim:** 3 label oranye; **Tinggi:** 2 label oranye; **Medium:** 1 label oranye; **Rendah:** 2 label hijau; **Minimum:** 1 label hijau)
   - Peserta juga mengidentifikasikan risiko yang berpotensi dihadapi secara individu maupun organisasi.
   - Peserta menulis alasan di balik penilaian pengukuran dan potensi tertimpa risiko pada sticky notes terpisah.
6) Peserta mempresentasikan hasil diskusi seperti sedang berjualan *live* di *marketplace.* (20 menit)
7) Fasilitator memberikan pengantar tentang contoh-contoh strategi mitigasi. (10 menit)
   - Peserta bermain "*Never Have I Ever?"*. Fasilitator menyediakan 10 (sepuluh) bentuk upaya mitigasi risiko. Peserta berdiri dan dijajarkan ke samping. Jika peserta pernah melakukan upaya mitigasi risiko yang disebut oleh fasilitator, maka peserta maju satu langkah. Sebaliknya, jika peserta tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, peserta diam.
   - Setelah permainan selesai, fasilitator dan peserta saling berbagi tentang pengalaman mitigasi risiko.
8) Fasilitator memberikan kuliah singkat tentang mitigasi risiko. (10 menit)
9) Fasilitator membantu peserta untuk menyusun strategi mitigasi risiko dan pelindungan masyarakat sipil melalui studi kasus yang telah disediakan fasilitator dengan metode diskusi kelompok. (45 menit)
   - Fasilitator menjelaskan mekanisme pengisian tabel dengan tools mitigasi risiko dan upaya pelindungan.
   - Peserta diminta untuk menjawab dan mengelaborasi alat mitigasi risiko melalui pengisian tabel yang disediakan oleh fasilitator. Panitia menye-

Langkah-langkah Fasilitasi

diakan perlengkapan kreatif untuk membuat poster presentation yang menarik

- Peserta mempresentasikan hasil penyusunan strategi mitigasi risiko dan pelindungan dengan metode *world cafe.*
- Peserta memberikan feedback secara bebas dengan menuliskannya ke dalam post-it dan ditempelkan di poster presentation kelompok lain. *Feedback* dapat berupa strategi menarik, strategi yang terlewat, dan sebagainya. Peserta menempel stiker berwarna hijau ke strategi dan analisis yang dianggap menarik dan akan diadopsi.
- Fasilitator dan Co-Fasilitator memberikan *feedback* tertulis kepada peserta.

10) Penutup. (5 menit)

MATERI	PEMANTAUAN ATAS IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL, DAN BERORGANISASI DI INDONESIA
Pokok bahasan	1) Urgensi pemantauan serta kerangka konseptual hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi 2) Prinsip-prinsip pemantauan 3) Metodologi pemantauan 4) Teknik pemantauan serta analisis terhadap pembatasan dan/atau pelanggaran hak-hak tersebut
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta dapat memahami kompleksitas kasus pembatasan dan/atau pelanggaran hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi; 2) Peserta dapat mempraktikkan pemantauan atas pembatasan dan/atau pelanggaran kebebasan berekspresi berpendapat, berkumpul, berorganisasi serta menganalisis dan melaporkan temuan pemantauan sebagai bahan advokasi berbasis bukti; 3) Peserta dapat menarik pola, tren, dan kecenderungan sistemik dari data pemantauan atas pelanggaran dan/atau pembatasan hak kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, sebagai dasar untuk penyusunan strategi advokasi yang lebih efektif dan kontekstual.
Metode	1) Diskusi dan tanya jawab 2) Presentasi 3) Praktik pemantauan
Bahaan Bacaan	Instrumen Pemantauan Implementasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi serta Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia.

MATERI	PEMANTAUAN ATAS IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL, DAN BERORGANISASI DI INDONESIA
Alat dan Bahan Belajar	1) Laptop atau komputer dengan akses internet (untuk praktik pemantauan media daring dan analisis sentimen publik) 2) Formulir atau borang pemantauan 3) Studi kasus untuk roleplay narasumber untuk latihan dokumentasi kasus di lapangan 4) Tautan berita dari media untuk latihan pemantauan media daring 5) Metaplan 6) Kertas Plano 7) Selotip 8) Sticky notes 9) Spidol berwarna
Waktu	185 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator memantik diskusi dengan studi kasus untuk merefleksikan secara sistemik atas peristiwa pembatasan dan/atau pelanggaran kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi (10 menit).
2) Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok untuk melanjutkan diskusi kelompok tentang peristiwa terkait hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi (30 menit).
   - Setiap kelompok memulai dengan satu aspek (misalnya: ekonomi, politik, sosial, hukum) dan menulis ide-ide mereka di plano besar. Dengan pertanyaan pemantik.
   - Setelah 5 menit, kelompok berpindah ke plano kelompok lain, lalu mereka menambahkan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide yang sudah dituliskan oleh anggota kelompok sebelumnya.
   - Putaran dilakukan hingga semua kelompok berkontribusi ke setiap aspek.
   - Di akhir, kelompok kembali ke plano awal mereka, mengulas apa yang ditambahkan oleh kelompok lain.
3) Presentasi singkat dari setiap kelompok, diskusi bersama, dan feedback dari fasilitator/co-fasilitator (20 menit).
4) Fasilitator menyampaikan materi tentang analisis sistemik atas peristiwa pembatasan dan/atau pelanggaran kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi (10 menit).
5) Fasilitator menyampaikan materi borang pemantauan serta teknik yang digunakan dalam pemantauan (30 menit). Praktik melakukan pemantauan sesuai metode yang telah ditetapkan (45 menit).

Langkah-langkah Fasilitasi

6) Praktik melakukan pemantauan sesuai metode yang telah ditetapkan (45 menit).
   - Pemantau media daring melakukan pemantauan dengan menganalisis 5-10 berita di setiap aspek hak, lalu mengisi borang pemantauan.
   - Pemantau dokumentasi kasus di lapangan disediakan skenario/studi kasus dan melakukan wawancara dengan beberapa co-fasilitator yang berperan sebagai berbagai aktor (misalnya: korban pelanggaran, keluarga korban, aktivis pembela HAM).
   - Pemantau analisis sentimen publik melakukan pemantauan dengan mengamati tren diskusi di media sosial terkait peristiwa tertentu.
7) Presentasi dari hasil ujicoba pemantauan dengan format *mini-zine* sebagai bahan advokasi (30 menit).
   - **Pertanyaan kunci untuk kelompok pemantau media daring:**

     Berapa banyak kasus pelanggaran/pembatasan yang kalian temukan dalam berita daring selama periode waktu tertentu?

     Apa saja bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi?

     Siapa saja aktor yang paling sering disebut dalam pelanggaran tersebut?

     Apakah ada tren dari waktu ke waktu?

     Apa satu temuan yang menurut kalian penting diketahui publik?
   - **Pertanyaan kunci untuk kelompok pemantau kasus di lapangan:**

     Apa bentuk pembatasan atau pelanggaran yang terjadi di tingkat lokal?

     Apa latar belakang peristiwa ini? Apakah berkaitan dengan isu pembangunan, investasi, kebijakan daerah, atau konflik sosial?

     Siapa korban utama dari pelanggaran ini? Dan bagaimana kondisi mereka setelah peristiwa terjadi?

     Bagaimana respons dari pihak berwenang atau institusi negara? Apakah ada upaya penyelesaian atau justru pengabaian?

     Apa satu temuan yang menurut kalian penting diketahui publik?
   - **Pertanyaan kunci untuk kelompok pemantau sentimen publik:**

     Apa peristiwa yang menjadi perhatian publik?

     Apa narasi yang muncul di media sosial seputar peristiwa ini?

     Apakah ada tagar kampanye, meme, atau bentuk ekspresi tertentu yang mencolok?

     Apakah sentimen publik cenderung mendukung korban/pembela HAM atau justru sebaliknya?

     Apa *insight* yang bisa kalian tarik: bagaimana publik menanggapi pelanggaran hak hari ini?
8) Fasilitator dan Co-Fasilitator memberikan *feedback* tertulis kepada peserta (5 menit).
9) Penutup (refleksi) oleh fasilitator dan peserta (5 menit).

Contoh Pembagian Studi Kasus untuk Materi Pemantauan

1) Kelompok Pemantau Media Daring → Fokus tren represi di momen aksi kolektif sipil yang menuntut keadilan sosial, dengan narasi keamanan dan stabilitas. Misal:
   - Penangkapan atau kekerasan terhadap peserta aksi *May Day* atau Hari HAM.
   - Aksi solidaritas untuk Papua atau Palestina yang dibubarkan aparat.
   - Demonstrasi menolak pengesahan RUU yang dianggap otoriter (RUU TNI, RKUHP, dsb.).
2) Kelompok Pemantau Dokumentasi Lapangan → Fokus pada pengalaman individu/komunitas yang dilemahkan ruangnya karena simbol atau ekspresi politik, termasuk oleh militer dan aktor kekerasan. Misal:
   - Pembubaran lapak baca, diskusi buku, atau pemutaran film.
   - Intimidasi terhadap mahasiswa atau komunitas karena membawa poster, menyanyikan lagu protes, dsb.
   - Kriminalisasi simbol tertentu (bendera, ekspresi identitas, ekspresi gender, dsb.).
3) Kelompok Pemantau Sentimen Publik → Fokus pada bagaimana wacana "kepentingan nasional" dan pembangunan digunakan untuk mengontrol opini publik dan memperkuat eksklusi. Misal:
   - Kampanye *#SaveRajaAmpat Greenpeace.*
   - Reaksi publik terhadap framing LGBTQ sebagai ancaman.
   - Seruan untuk membungkam aktivis, jurnalis, atau mahasiswa yang "melawan arus.".
   - Diskusi di ruang digital terkait #IndonesiaGelap atau #PeringatanDarurat.

MATERI	ADVOKASI UNTUK KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL, DAN BERORGANISASI DI INDONESIA
Pokok bahasan	1) Pengetahuan Dasar Advokasi 2) Strategi dan Teknik Advokasi 3) Menyusun Kertas Posisi 4) Menyusun Rencana Kampanye dan Video Pendek
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta memahami konsep dasar advokasi dalam konteks kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi; 2) Peserta dapat menyusun strategi dan teknik serta saling berbagi dan mengembangkannya dalam sebuah advokasi; 3) Peserta dapat membuat kertas posisi yang baik dengan argumen yang kuat dan berbasis data untuk mendukung posisi yang diambil. 4) Peserta dapat membuat rencana kampanye dan video pendek.

MATERI	ADVOKASI UNTUK KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERKUMPUL, DAN BERORGANISASI DI INDONESIA
Metode	1) Ceramah; 2) Kerja Kelompok; 3) Curah pendapat; 4) Metaplan; 5) Diskusi dan tanya jawab; 6) Praktik: Pembuatan rencana kampanye dan video pendek; 7) Umpan balik.
Bahaan Bacaan	1) Advokasi Hak Masyarakat, YLBHI, 2014. 2) Dipotalk: Mengapa PJ Gubernur Harus Dibatalkan? (14 November 2022). 3) Video liputan pendaftaran gugatan.
Alat dan Bahan Belajar	1) Presentasi; *2) Flipchart;* 3) Karton/Plano menyesuaikan kelompok yang sudah dituliskan Tim Advokasi, Strategi dan Teknik Advokasi dan Input dari Peserta lainnya; 4) Metaplan 10 x jumlah kelompok, setiap metaplan dituliskan masing-masing satu langkah mekanisme advokasi; 5) Ponsel dengan kamera atau kamera digital; 6) Aplikasi penyuntingan video; 7) Laptop.
Waktu	385 menit: Sesi 1 140 menit + Sesi 2 125 menit + Sesi 3 120 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

Pengetahuan Dasar Advokasi;

1) Sebagai pembuka, Fasilitator menjelaskan pokok bahasan, tujuan, metode dan bahan bacaan pada BAB 4; (5 menit)
2) Presentasi fasilitator tentang Prinsip Dasar Advokasi; (5 menit)
3) Fasilitator menginstruksikan peserta untuk melakukan pembagian kelompok untuk bermain peran menjadi Tim Advokasi dan menyusun Strategi dan Teknik Advokasi (dapat menggunakan kelompok yang sudah ada pada sesi sebelumnya). Setiap kelompok diberikan masing-masing satu studi kasus, satu plano (berisikan tabel yang berisi komposisi Tim Advokasi, Strategi dan

Langkah-langkah Fasilitasi

Teknik Advokasi, serta Input dari Peserta Lain dan Fasilitator), serta 10 metaplan yang berisikan mekanisme advokasi. Pertama, peserta akan diminta untuk menyusun tim advokasinya, siapa saja yang mungkin dilibatkan dalam tim advokasi (peserta dapat melanjutkan dari analisis aktor yang sudah dibuat pada BAB 2. Kedua, peserta diminta untuk menyusun 10 metaplan yang berisikan mekanisme advokasi dan menjelaskannya dalam plano. (5 menit)

4) Diskusi Kelompok Menyusun Strategi Advokasi; (30 menit)
5) Presentasi Kelompok; (40 menit)
6) Curah pendapat (tanggapan) dari masing-masing kelompok serta input dari fasilitator; (40 menit)
7) Presentasi Fasilitator tentang Strategi dan Teknik Advokasi (10 menit)
8) Fasilitator menutup sesi atau memberikan pengantar ke materi berikutnya. (5 menit)

Membuat Kertas Posisi;

1) Fasilitator memberikan pengantar materi yang berisikan gambaran tahapan materi dari awal hingga akhir. (5 menit)
2) Presentasi fasilitator tentang Kertas Posisi; (5 menit)
3) Praktik membuat kertas posisi; (30 menit)
4) Presentasi Kertas Posisi tiap kelompok; (40 menit)
5) Curah pendapat (tanggapan) dari masing-masing kelompok serta input dari fasilitator; (40 menit)
6) Fasilitator menutup sesi atau memberikan pengantar ke materi berikutnya. (5 menit)

Membuat Rencana Kampanye dan Video Pendek;

1) Diskusi (15 menit)
   Fasilitator mengajak peserta untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai pembuatan rencana kampanye dan output kampanye dalam kerja-kerja yang pernah dilakukan.
2) Presentasi materi (30 menit)
   Fasilitator menyampaikan materi dengan urutan sebagai berikut: (1) Kampanye; (2) Rencana kampanye; (3) Studi kasus; (4) Pembuatan video pendek.
3) Pembuatan rencana kampanye dan video pendek (60 menit) Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok kemudian membuat rencana kampanye pada file yang sudah disiapkan oleh fasilitator.
4) Setiap kelompok membuat video pendek yang merupakan bagian dari rencana kampanye berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok dan mengunggahnya ke folder yang sudah disiapkan oleh fasilitator.
5) Umpan balik (15 menit) Peserta mempresentasikan rencana kampanye serta hasil pembuatan video pendek dari masing-masing kelompok kemudian ditutup dengan saling memberikan umpan balik.

Lampiran:

Tabel Menyusun Strategi dan Teknik Advokasi

MEMBENTUK TIM ADVOKASI		LANGKAH DAN TEKNIK ADVOKASI	INPUT PESERTA LAIN DAN FASILITATOR
LINGKAR INTI	TIM PENDUKUNG		

Catatan:
*Bagian ini peserta dapat menggunakan analisis aktor yang telah dibuat pada Bab 2;
**Bagian ini peserta dapat diminta untuk mengeksplorasi 10 langkah mekanisme advokasi;
***Bagian ini peserta akan mempresentasikan kemudian diberikan input oleh peserta lainnya dan juga Fasilitator

Tulisan pada Metaplan:
1) Pengumpulan Data.
2) Perencanaan Strategi Advokasi.
3) Membentuk Lingkar Inti.
4) Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat.
5) Menggalang Dukungan Publik (Kampanye).
6) Perluasan Jaringan.
7) Mempengaruhi Kebijakan.
8) Melancarkan Tekanan.
9) Menempuh Upaya Hukum.
10) Menggalang Pembiayaan.

Gambaran Studi Kasus yang dapat diberikan:

Box Studi Kasus:

Studi Kasus I

Kamu adalah seorang mahasiswa baru yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Kamu berangkat bertiga dengan kedua orang temanmu sesama mahasiswa baru. Sore hari, Gerbang DPR-RI terbongkar. Ada arahan dari mobil komando

Box Studi Kasus:

untuk masuk ke dalam melalui pagar yang terbongkar. Dan kalian bertiga masuk ke dalam gedung DPR-RI. Malam hari, polisi memukul mundur mahasiswa, kalian bertiga terjebak di dalam gedung DPR-RI. Ada dua kejadian besar yang terjadi. Pertama, satu orang temanmu ditangkap oleh kepolisian. Kedua, satu orang temanmu dipukuli oleh kepolisian, hingga kepalanya terluka dan tidak lama kemudian tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit. Untungnya, kamu selamat dalam kejadian tersebut. Advokasi seperti apa yang akan kamu lakukan?

Rujukan Referensi Kasus: *#ReformasiDikorupsi #Peringatan Darurat #IndonesiaGelap*

Studi Kasus II

Kamu adalah seorang perempuan, anggota Pers Mahasiswa, dan sering membuat tulisan soal keberagaman gender. Ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi yang tidak mau bertanggung jawab karena telah menghamili pacarnya. Kantor polisi tempat polisi itu bertugas justru membela polisi tersebut dengan narasi yang berbeda. Organisasimu membuat liputan khusus soal kasus tersebut, dan kamu ditugaskan untuk memimpin. Setelah dirilis, ternyata tulisanmu viral, dan akunmu mulai mendapatkan serangan digital berunsur KBGO. *Doxing* pun terjadi dengan narasi kamu adalah seorang "LGBT". Organisasimu berniat melawan dengan membuat konferensi pers. Namun ketika konferensi pers, ada ormas yang datang melakukan intimidasi dan membubarkan kegiatan, sehingga konpers terpaksa dibatalkan.

Rujukan referensi kasus: *Kasus Ayu Saree 2024, TNI bubarkan acara perpustakaan jalanan di Bandung 2016.*

Studi Kasus III

Kamu adalah seorang wakil ketua suatu organisasi mahasiswa. Ketika penerimaan mahasiswa baru, ketuamu mengajak mahasiswa baru mengikrarkan sumpah mahasiswa. Pihak kampus merasa bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan susunan acara yang disepakati. Tiba-tiba pihak kampus mengeluarkan surat peringatan yang pada intinya berisi untuk membekukan organisasi dan sanksi *drop out* kepada ketuamu. Organisasi merespon surat tersebut dengan surat penolakan. Akhirnya pihak kampus membekukan organisasi mahasiswamu dan menghentikan semua pembiayaan kepada

Box Studi Kasus:

organisasimu. Ketuamu juga diberikan hukuman drop out. Dalam sebuah rapat, sebagai wakil ketua kamu diminta untuk memimpin advokasinya. Apa yang akan kamu lakukan?

Rujukan referensi kasus: *Kasus BEM FISIP UNAIR 2024, DO Skorsing UNTAG 2014, DO UNAS 2020.*

Studi Kasus IV

Kamu adalah seorang mahasiswa baru. Di tempatmu kuliah, terdapat Peraturan Rektor yang melarang mahasiswanya ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Kamu sadar bahwa peraturan itu tidak baik, dan perlu melakukan advokasi. Apa yang akan kamu lakukan?

Rujukan referensi kasus: *Surat Edaran Larangan Aksi Unjuk Rasa 2019 dan 2024.*

MATERI	RENCANA AKSI KOLEKTIF
Pokok Bahasan	Penyusunan agenda tindak lanjut setelah pelatihan.
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta dapat merumuskan dan menyepakati rencana aksi kolektif yang akan dilaksanakan setelah pelatihan, terutama terkait pemantauan dan advokasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. 2) Peserta memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam koordinasi dan pelaksanaan aksi kolektif.
Metode	*Brainstorming* atau curah pendapat.
Alat dan Bahan	*1) Flipchart*; 2) Plano; dan 3) Spidol
Waktu	30 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator membuka sesi dengan memberikan penjelasan singkat tentang tujuan sesi (5 menit).
2) Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan apa rencana aksi kolektif yang dapat dilakukan setelah pelatihan, terutama terkait dengan praktik pemantauan dan advokasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi dengan menyesuaikan konteks lokal masing-masing (25 menit).

MATERI	PENUTUP PELATIHAN
Pokok Bahasan	1) Post-test Pelatihan. 2) Evaluasi Pelatihan.
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta dapat mengisi post-test sebagai refleksi atas materi dan pemahaman yang diperoleh selama pelatihan. 2) Peserta dapat memberikan evaluasi terhadap modul dan pelatihan untuk menilai efektivitas dan area yang perlu ditingkatkan.
Metode	Kerja mandiri.
Alat dan Bahan	*1) Post-test (barcode google form)* *2) Evaluasi (barcode google form)*
Waktu	15 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator meminta peserta untuk mengisi post test yang disajikan melalui barcode google form. (5 menit)
2) Fasilitator meminta peserta untuk mengisi lembar evaluasi yang disajikan melalui barcode google form. (10 menit)
3) Fasilitator menutup pelatihan.

MATERI	MERUMUSKAN RENCANA AKSI KOLEKTIF YANG BERKELANJUTAN BERSAMA ORANG MUDA
Pokok bahasan	1) Identifikasi aktor, ketimpangan kuasa, dan hambatan yang dihadapi peserta dan komunitasnya dalam mengakses ruang sipil dan kebebasan sipil. 2) Gambaran visi kolektif dari kacamata orang muda tentang masyarakat yang adil dan setara dalam konteks kebebasan sipil. 3) Penyusunan rencana aksi kolektif yang dipimpin oleh orang muda.
Tujuan Pembelajaran	1) Peserta memahami konsep dasar advokasi dalam konteks kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi; 2) Peserta dapat menyusun strategi dan teknik serta saling berbagi dan mengembangkannya dalam sebuah advokasi; 3) Peserta dapat membuat kertas posisi yang baik dengan

MATERI	MERUMUSKAN RENCANA AKSI KOLEKTIF YANG BERKELANJUTAN BERSAMA ORANG MUDA
	argumen yang kuat dan berbasis data untuk mendukung posisi yang diambil. 4) Peserta dapat membuat rencana kampanye dan video pendek.
Metode	*1) Brainstorming* atau curah pendapat; dan 2) Diskusi dan tanya jawab.
Alat dan Bahan	Daring 1) Laptop; dan *2) Zoom Meeting* Luring *1) Flipchart;* 2) Plano; dan 3) Spidol
Waktu	75 menit

Langkah-langkah Fasilitasi

1) Fasilitator membuka sesi dengan memberikan penjelasan singkat tentang tujuan sesi (5 menit).
2) Fasilitator mengajak peserta untuk elaborasi dan berefleksi melalui curah pendapat dengan pertanyaan kunci sebagai berikut (30 menit):
   a) Menurutmu, siapa saja aktor atau institusi yang paling berpengaruh terhadap ruang sipil di wilayahmu?
   b) Apakah kamu melihat ketimpangan kekuasaan yang membuat sebagian kelompok lebih mudah bersuara, sementara yang lain dibungkam? Bisa kasih contoh?
   c) Apa gap keterhubungan antara kolektiva orang muda dengan gerakan masyarakat sipil yang lebih luas?
3) Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan visioning untuk merancang aksi kolektif yang realistis dan berkelanjutan dengan pertanyaan kunci sebagai berikut (40 menit):
   a) Dalam imajinasimu, seperti apa bentuk masyarakat yang lebih adil dan setara dalam hal kebebasan sipil?
      Metode opsional:
      - Gambar peta imajinasi *(vision map)*
      - Cerita masa depan (*storytelling* kolektif)
   b) Apa peran yang ingin kamu ambil dalam mewujudkan masyarakat seperti itu?
   c) Merumuskan aksi bersama berdasarkan nilai bersama dan kekuatan yang dimiliki.
      - Mengambil elemen dari visi dan mengubahnya menjadi tujuan konkret;

Langkah-langkah Fasilitasi

- Tentukan langkah awal yang mungkin dilakukan, termasuk siapa kelompok rentan dan marjinal yang menjadi target utama dengan mengaitkan analisis dari materi interseksionalitas di awal;
- Memetakan pembagian peran dan siapa yang bisa diajak;
- Mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan; dan
- Menyusun timeline aksi kolektif.

4) Fasilitator menutup sesi.

(Profil)

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan inisiatif jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang muncul pada tahun 2006 untuk merespon perubahan peraturan yang mengancam kerangka hukum OMS di Indonesia. KKB mulai aktif kembali pada tahun 2010 hingga saat ini untuk merespon penyempitan ruang sipil, terutama karena melemahnya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat/berorganisasi di Indonesia. KKB terlibat aktif dalam mengawal dan mengadvokasi RUU Yayasan menjadi UU Yayasan, UU Ormas, Perppu Ormas, hingga RUU Perkumpulan.

Saat ini, KKB telah mengaktivasi simpul dan anggota KKB menjadi 41 anggota di 12 wilayah di Indonesia. KKB juga menyepakati dua cita-cita perubahan selama periode 2025 - 2028, yaitu: 1) kebebasan sipil yang terawat, aman, dan inklusif dan 2) pembela HAM dan OMS yang resilien, bersolidaritas, dan berkelanjutan. Cita-cita perubahan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan utama yang pelaksanaannya bersifat dinamis bergantung pada perkembangan terkini dalam merawat kebebasan berserikat dan melindungi ruang sipil di Indonesia. Dalam periode tersebut, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) ditunjuk menjadi Sekretariat KKB.

Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan maupun diskusi/seminar tentang kondisi ruang sipil di Indonesia, khususnya berkaitan dengan UU Ormas, UU Yayasan, RUU Perkumpulan, dan peraturan pelaksanaannya. Sekretariat KKB dapat dihubungi melalui Riza Imaduddin Abdali (Koordinator KKB) dalam email: riza.abdali@yappika-actionaid.or.id atau koalisikebebasanberserikat@gmail.com.

YAPPIKA